BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Desa juga memandatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat.

Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari pada Peraturan Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenanganya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa. Untuk mengoptimalkan Dana Desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, proses penyusunan anggaran diawali dengan penetapan tujuan dan kebijakan. Persamaan persepsi antara pihak tentang apa yang akan dicapai dan keterkaitan tujuan dengan berbagai program yang akan dilakukan

sangat krusial bagi kesuksesan anggaran.[1] Selain itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan kewenangan kepada desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal skala desa. Hal ini sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi Desa untuk memberdayakan masyarakat Desa yang ditunjukkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.

Pembangunan Desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya.

Peraturan Daerah Pasal 1 Nomor 6 tahun 2016 menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia

[1]Nurhayati. Analisis Keuangan Daerah dan Transparansi. Universitas Kepulauan Riau. 2017. Vol 1. Hlm 42

serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut data Badan Pusat Statistik jumlah Desa di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan hal ini disebabkan berbagai alasan. Salah satu alasan pemicu penambahan jumlah Desa adalah konsep desentralisasi yang memungkinkan daerah Indonesia.[2] Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan selama ini menjadikan masyarakat Desa sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera. Melalui Dana Desa (DD), desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-

[2]Maypen Hery. Kabupaten Batang Hari Dalam Angka 2018. Penerbit Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang Hari. 2018. Hlm 5.

hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri.

Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari No 16 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2018 menjelaskan bahwa

1. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
2. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional
3. Rekening khas umum daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menmpung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKP, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pembangunan Desa diharapkan berjalan dengan sebagai mana mestinya yang diharapkan masyarakat Desa, oleh sebab itu untuk mencapai sasaran pembangunan yang diharapkan perlu adanya Dana Desa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan Serta mampu mengimplementasikan pembangunan yang dibuat harus sesuai kebutuhan dan dipandang tepat dengan kondisi Desanya. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu perubahan struktur yang dimulai dari upaya memperbaiki kapabilitas manusia hingga akhirnya mampu secara mandiri melakukan perlindungan sosial yang merupakan wujud nyata keberhasilan pembangunan.[3]

Mengingat dan menyadari banyaknya keterbatasan dalam pembangunan suatu daerah maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru, dimana semua kebutuhan masyarakat terjamin sampai ke pelosok desa, sehingga dibutuhkan daerah yang otonom untuk desa agar bisa mengelola sumber-sumber pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh.

Desa Awin merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Masalah utama yang dihadapi Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari yakni berkaitan dengan belum meratanya pembangunan Desa terutama akses jalan Desa yang merupakan akses utama bagi masyarakat untuk melakukan berbagai mobilitas sosial dan ekonomi. Jalan di Desa Awin sebagian masih terbuat dari bebatuan, hal ini membuat akses jalan sulit untuk dilalui saat berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan terutama jika sedang

[3]Solikatun, dkk. Kemiskinan Dalam Pembangunan. Universitas Sebelas Maret. 2014. Vol 1. Hlm. 70

musim hujan. Kepala Desa Awin menyesuaikan pengambilan suatu kebijakan melalui tahapan dari kebijakan publik yakni Tahap penyusunan Agenda dan Tahap Formulasi sebagai bentuk penyesuaian dalam pengambilan suatu kebijakan.

Di Tahun 2018 kepala Desa melakukan pengadaan pembangunan jalan permukiman dan pengadaan jalan Desa antar permukiman menuju ke wilayah pertanian sebagai hasil dari suatu kebijakan yang dilakukan kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dilakukan karena kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif "Desa Membangun" disadari masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu tampak dalam kapasitas SDM yang ditemukan dalam pengambilan suatu kebijakan di Desa Awin.[4]

Pembangunan Jalan dibagun menuju permukiman masyarakat dan menuju ke wilayah pertanian masyarakat sehingga pembangunan ini diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Berdasarkan penjabaran di atas maka Desa hendaknya memiliki kebijakan yang mendukung terhadap kemajuan dan pembangunan, kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat Desa yang dilaksanakan melalui pembangunan Desa yang berkelanjutan. Dari beberapa masalah di atas peneliti melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan sumber referensi dalam melakukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

[4]Data Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. 2019. Hlm 23.

1. Mulyana Sugih. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Banjar panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan.Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2012”. Metode penelitian ini menggunakan purposive sampling. Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Hasil: Menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Banjar panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan yaitu:

Usia yang dominan berdasarkan penelitian yaitu usia dewasa antara 21-55 tahun sebanyak 72 orang, sedangkan untuk jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian pengungkapan jenis kelamin laki-laki sebanyak 63 orang, dan begitu juga dengan tingkat pendidikan yang mana berdasarkan penelitian yaitu pendidikan yang dominan adalah pendidikan SD dengan jumlah 33.[5]

2. Andika Piska.”Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrasi Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Pada tahun 2012. Hasil: Fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam kategori baik hal ini sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan sebesar 66, 28% atau berada pada interval 51-75%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi kepala desa sebagai administrator pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Yaitu: Kurangnya pengawasan dan pengontrolan yang dilakukan

[5]Sugih Mulyana. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Palalawan. *Skripsi tidak diterbitkan.* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2012.

oleh kepala desa terhadap pelaksanaan pembangunan.[6] Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi aspek objek penelitian. Kemudian peneliti mengkaji tentang kebijakan terdahulu lebih mengulas permasalahan tentang Fungsi Kepala Desa dan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Politik Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian maka rumusan masalah adalah Bagaimana Tahapan Pembuatan Kebijakan yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Tahapan Kebijakan Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari.

---

[6]Piska Andika. Fungsi Kepala Desa Sebagai Administrasi Pembangunan di Desa Pulau Rengas Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. *Skripsi tidak diterbitkan.* Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu politik yang berkaitan dengan politik kebijakan.
2. Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi Masyarakat Desa

Dapat di jadikan referensi bagi masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan masyarakat harus lebih memahami dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa.

2) Manfaat bagi Kepala Desa

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kepala desa agar dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa lebih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan Desa.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Teori Kebijakan

Selanjutnya menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno kebijakan hendaknya dipahami sebagai kegiatan yang sedikit banyak berhubungan bersama konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Keban menjelaskan bahwa Public policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk,

kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, suatu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu – isu dan metode implemntasinya.[7]

Sementara Carl Friedrich mengatakan bahwa[8] kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sarana yang diinginkan. Charles O. Jones menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

A. Gelar dan tujuan yang diinginkan
B. Proposal yaitu dokumen untuk mencapai sebuah tujuan
C. Program yaitu suatu usaha untuk mencapai tujuan
D. Keputusan yaitu beberapa tindakan yang menentukan tujuan, membuat rencana, meleaskan dan mengefakuasi program.
E. Efek yaitu akibat program yang telah dibuat baik sekunder maupun primer.

Kebijakan Publik sudah pasti membentuk lingkungan sekitar sebagai system sosial, ekonomi, politik serta budaya. Karena pada suatu saat nanti kebijakan akan

[7]Kebayan Yeremias. Enam Dimensi Tentang Administrasi Pubik, Konsep, Teori, dan Isu. (Yogyakarta: Gava Media). 2004. Hlm. 55

[8]Yulianto Kaji, Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press). 2015. Hlm. 22

menyalurkan masukan pada lingkungan yang ada disekitarnya, namun dengan kata lain lingkungan bisa juga membatasi perilaku yang dikerjakan oleh pembuat kebijakan karena mereka saling berkaitan seperti hubungan simbiosis mutualisme. Sebab itulah, sebuah kebijakan yang tersusun dengan baik dan terarah dalam suatu system yang baik pula, seharusnya memperhatikan hal-hal yang dikemukakan sebagai berikut:[9]

a. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penelitian
b. Tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertentangan dan harus bersifat konsisten
c. Harus menyesuaiakan dengan keadaan yang berkembang
d. Harus membantu mencapaikan sasaran dan harus menggunakan kata-kata yang objektif
e. Harus sesuai dengan kondisis-kondisi yang eksternal

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa lingkungan kebijakan perlu dipahami dalam segi makro maupun mikro. Hal ini dapat meliputi beberapa hal yaitu bisa melihat faktor social, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Bisa juga mempengaruhi kebijakan pada lingkungan yang khusus karena dari beberapa bentuk lingkungan lain dapat mempengaruhi kebijakan publik, baik dilihat dari tahapan formulasi, imlementasi sampai evaluasi. Seperti karakteristik geografis, populasi masyarakkat, budaya politik, social dan system ekonomi.[10] Menurut Suharno Ciri-ciri Kebijakan antara lain:

[9]Winardi. Perilaku Organisasi. Taristo Bandung. 1990. Hlm 120
[10]Al Zufeu Moh Salim. Kepemimpinan. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press). 2014. Hlm 6

a) Kebijakan Publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai pelaku tindakan atau yang serba di acak dan kebetulan. Kebijakan - kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh penjabat-penjabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, Melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan.

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi ataupun menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan bidang-bidang tersebut. Kebijakan publik mungkin bertujuan positif, mungkin pula negative, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan penjabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan berbagai alternatif yang akan dipilih hanya berdasarkan penelitian rasional, namun proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dunia nyata.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama. Para administrator biasanya cendrung mengikuti kebiasaan lama sekalipun keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu telah dikritik sebagai suatu kesalahan dan perlu diubah.
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya.
4. Adanya pengaruh kelompok dari luar. Pembuat keputusan seringkali dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman orang lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintah.
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan.

Menurut N William Duun Tahap-tahap Kebijakan publik sebagai dikutip Budi Winarno sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadupadankan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.[11]

[11] Husein Muhammad. Partisipasi Politik Perempuan. Dimuat pada tanggal 29/09/2021 yang diakses dari http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=605.

2) Tahap Formulasi

Pada tahap formulasi masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan di bahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Permasalahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan terbaik. Permasalahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Formulasi umumnya memfokuskan pada identifikasi yang mempengaruhi.

3) Tahap Adopsi

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur dan lembaga atau putusan peradilan.

4) Tahap Implementasi

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau penjabat ataupun kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing.

5) Tahap Evaluasi

Dalam arti khusus, bahwa evaluasi berhubungan dengan produksi informasi nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Dalam tahap evaluasi ini kebijakan akan dinilai untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang di inginkan, yaitu memecahkan maslah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan kriteria- kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang di inginkan apa belum.

Evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan salah satunya adalah evaluasi memberikan informasi yang valid dan bisa dipercaya berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu seberapa bermakna suatu kebutuhan, nilai dan kesempatan telah diwujudkan melalui tindakan publik.

1.5.2. Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam Bahasa inggris adalah leadhership yang berasal dari kata lead yang berarti pergi, sehingga pemimpin yang secara umum diartikan memiliki gambaran keamanan akan pergi artinya suatu arah dimana seseorang dipengaruhi untuk pergi. Sedangkan kepemimpinan secara etimologi adalah kemampuan sekaligus keberhasilan seseorang untuk mempengaruhi dan membujuk pihak atau tertentu untuk mencapai sebuah tujuan bersama-sama dan akan menjadi struktur proses. Pengertian kepemimpinan menurut Hasibuan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang telah dikemukakn oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan sebagai cara seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi yang telah dipimpinnya. Orang yang memiliki kepemimpinan di sebut pemimpin. Menurut Syafie pemimpin adalah orang yang mengepalai. Kepala desa adalah seseorang yang menjadi pemimpin di desa tersebut. Jadi seorang pemimpin kepala desa harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah dipimpinnya.[12] Menurut Kartini Kartono[13] teori kepemimpinan sebagai berikut:

1. Teori Otokratis

Teori ini bedasarkan pada perintah dan tindakan yang sewenang-wenang. Pemimpin melakukan pengawasan yang ketat agar pekerjaan dapat berlangsung secara efisien dan kepemimpinannya berorientasi pada strukrtur organisasi dan fungsi kepentingan. Ciri khasnya adalah sebagai berikut:[14]

A. Memberikan perintah yang harus dipatuhi
B. Menentukan kebijakan sendiri tanpa konsultasi dengan anggotannya
C. Tidak pernah memberikan informasi yang mendetail tentang rencana yang akan dilakukan tapi hanya memberikan langkah yang harus dilakukan
D. Memberikan pujian dan kriktik pribadi kepada anggotanya

[12]Syafiie Kencana. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jakarta: Bumi Aksara). 2003. Hlm. 132

[13]Kartini Kartono. Pemimpin dan Kepemimpinan. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1983). Hlm. 61

[14]Ibid. Hlm 61

2. Teori Psikologi

Teori ini menyatakan fungsi seorang pemimpin adalah mengembangkan dan memunculkan system motivasi terbaik untuk anggotanya agara kesediaannnya dalam bekerja bisa berjalan dengan baik. Pemimpin ini merangsang anggotannya umtuk bekerja agar mencapai sarana-sarana organisasi, maupun untuk tujuan pribadi. Kepemimpinan ini lebih menekankan pada sikap psikis manusiawi seperti pengakuan, martabat, minat, emosional status social, suasana hati dan sebagainya.

3. Teori Sosiologi

Kepemimpinan yang digunakan teori sosiologi adalah untuk melancar relasi sebuah organisasi sebagai cara untuk dapat menyelesaikan konflik terhadap anggotannya sehingga akan menimbulkan kerja sama yang baik. Anggota pasti mengetahui hasil dari pengambilan sebuah tindakan korektif apabila terdapat permasalahan yang menyimpang dalam organisasi tersebut. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Berlangsung pula dengan akkativitas kepemimpinann. Apabila aktivitas-aktivitas tersebut dipilih-pilih maka akan terlihat gaya kepemimpinan bersama dengan polannya. Gaya kepemimpinan tersebut adalah bagian untuk mengklasi tipe kepemimpinan. Menurut Rivai gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu:

a. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan tugas
b. Gaya kepemimpinan yang berpola pada pelaksanaan hubungan kerja sama
c. Gaya kepemimpinan yang berpola pada kepentingan dari hasil yang dicapai

Ajudi Atmosudirdjo menyebutkan bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif administrative.

Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan praksara masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

1.5.3. Pembangunan Desa

Rostow menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output yang diproduksi sebelumnya dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah dalam lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Menurut hanafiah pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa

memecahkan maslah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat.

Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaiman menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut haeruman ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan yaitu:[15]

A. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses ilmiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari laur sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

B. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan mendorong dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan

C. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

[15]Fauzi Kurniawan. Beberapa Teori Tentang Pemabngunan. http://beberapa teori tentang pembangunan dan html post 29-03-2019

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagaiman dimaksud pada ayat 2 bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat 3 bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

a. Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan
b. Menjamin sigkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Faktor- Faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam pembangunan sebagai berikut:

a) Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi social, pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.

b) Alokasi Dana Desa ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan

oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaanya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh kepala Desa. Bantuan ADD dimaksud sebagai bantuan simulant atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisispasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan.

c) Sumber Daya Manusia Kondisi pendidikan masyarakat akan berhubungan erat terhadap kualitas pola pikir masyarakat di dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan yang ada di daerahnya, tanpa adanya penguasaan teknologi dan kinerja pemerintah desa yang memiliki kapabilitas, kreadibilitas, dan responbilitas yang memadai. Kebijakan perencanaan pembangunan merupakan suatu pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (memanage) pembangunan di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Tahap-tahap Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam menyusun sebuah perencanaan pembangunan Desa tentu pemerintah Desa harus sesuai dengan kewenangan yaitu sebagai pemerintah Desa, akan tetapi harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan yang sudah dibuat di tingkat Kabupaten/Kota. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip perencanaan pembangunan adalah:

1) Kegiatan yang dilakukan harus berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

2) Pembangunan masyarakat yang seimbang memerlukan penerapan program dengan beberapa tujuan

3) Perubahan sikap masyarakat sangat penting dicapai pada tahap awal pembangunan

4) Pembangunan masyarakat menghendaki peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih baik, revitalisasi pemerintah lokal dan transisi menuju administrasi lokal yang efektif.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terprinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.[16] Dalam pelaksanaan pembangunan desa tentu saja berskala lokal desa dan telah dilaksanakan sejak ditetapkannya APBD. Pelaksanaan pembangunan desa juga dilakukan dengan melibatkan swakelola desa, maksudnya ialah pembangunan desa berskala lokal ini telah melibatkan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan programnya agar berjalan sesuai perencanaan awal.

3. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam Bahasa Indonesia asal katanya “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa yang dilakukan dengan cara partisispatif

[16]Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2002. Hlm 7.

oleh masyarakat desa dengan tujuan untuk terciptanya sebuah pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan efisien. Suatu pemerintahan yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan. Menurut Hudson Infrastruktur adalah sebuah system fasilitas publik, yang bersifat fundamental di tunjukan kepada masyarakat atau khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Secara umum infrastruktur adalah istilah yang berhubungan maknanya dengan struktur.

1.6. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menyangkut konsep tahap-tahap penelitian secara teoritis dan dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

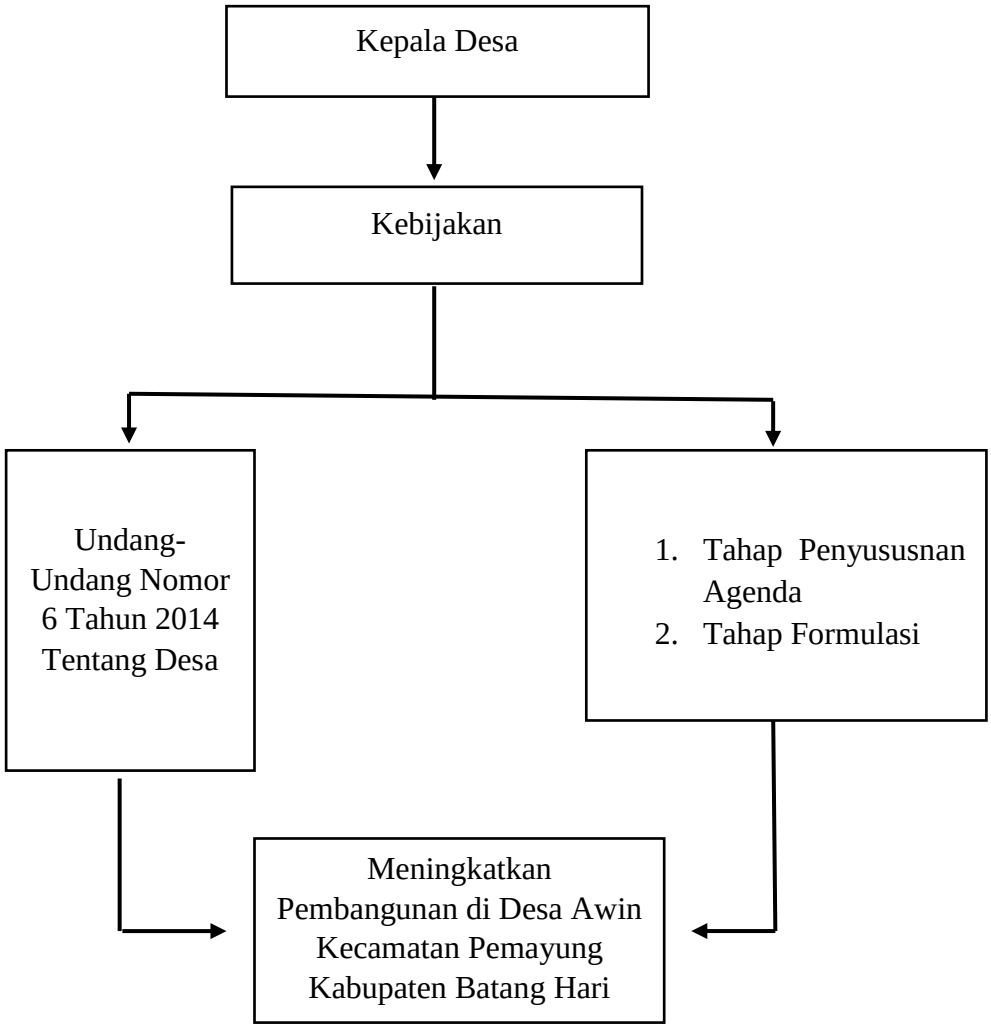

Kepala Desa merupakan penguasa tunggal dalam suatu sistem pemerintahan Desa, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat), Mentaati dan menegakkan peraturan perundang undangan), Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, Memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran dan salah satu kewajiban dari seorang kepala Desa adalah membuat kebijakan berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.

Kebijakan yang dibuat kepala Desa hendaknya berlandaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur kewenangan kepala Desa, masa jabatan kepala desa, sistem pemilihan dan tugas serta kewajiban kepala Desa.

Selain itu pembuatan kebijakan oleh kepala desa di Desa Awin menyesuaikan dengan kebijakan publik yaitu melalui tahapan - tahapan kebijakan antara lain merumuskan masalah-masalah yang ada di Desa sehingga masalah tersebut bisa ditentukan untuk dijadikan sebagai prioritas dalam masalah yang ada di Desa (tahap penyusunan agenda), menentukan solusi dari masalah yang terjadi (tahap formulasi), Dengan adanya kebijakan yang dibuat berdasarkan tahapan-tahapan dan berlandaskan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dan lebih berpotensi untuk mencapai tujuan dari pembuatan kebijakan yang dilakukan kepala Desa.

1.7. **Metode Penelitian**

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis skripsi yang penulis telaah atau teliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Creswell mendefenisiskan metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisispan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy mendefinisiskan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam penelitian ini akan meneliti sebuah fenomena yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat diperhitungkan sebelum penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengungkapkan sebuah fakta.[18]

---

[17]Jhon W. Craswell, *Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4-5.

[18]Amiruddin, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Prana Ilmu , 2016), hlm.98

1.7.2. Lokasi/Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. Adapun alasan peneliti ini dilakukan ditempat tersebut dikarenakan lokasi tempat sumber penelitian dan pengumpulan data. Dan juga menjadi lokasi yang sesuai dengan indicator penelitian ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam memberikan informasi lebih lanjut tentang kebijakan kepala desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Awin.

1.7.3. Fokus dan Dimensi Penelitian

Untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif, spradeley dan Sugiyono menyatakan bahwa focus itu merupakan dominan tunggal atau beberapa dominan yang terkait situasi sosisal. Penentuan focus didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjajahan umum, dari penjajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial.[19] Fokus dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan bagaimana Politik Kebijakan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 209.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.[20] Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Data sekunder bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu peneliti menggunakan teknik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data. Sumber data berupa media cetak, peraturan pemerintah, Undang-Undang dan web resmi Desa Awin Kecamatan Pemayung.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ialah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data (informan). Penelitian kualitatif tidak mengunakan sempel oleh karena itu informan yang digunakan berdasarkan pada keterlibatan seorang informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian.

Menurut Lexy J Moleong penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penentuan orang yang benar-benar mengerti atau pelaku yang terlibat langsung kedalam permasalahan penelitian. Dapat dikatakan bahwa orang tersebut adalah informan dalam penelitian ini.

[20]Suharsimi Arikunto.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. Hlm 114

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari
2. Sekretaris Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari
3. Aparat Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari
4. Masyarakat Desa Awin Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data primer diantaranya:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan terlebih dahulu.[21] Teknik pengumpulan data ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian dengan cara tanya jawab secara mendalam dan terbuka. Bentuk data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung yang merupakan pengalaman langsung dan pengetahuan informan/responden dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi adalah Proses Pengambilan Data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

[21]Amirudin, *Op Cit*, hlm 213

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditentukan. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (misalnya koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen private misalnya: buku harian, surat, email. Dan foto selama penelitian berlangsung.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan memuat kesimpulan dan laporan. Dalam penelitian kualitatif berdasarkan kurun waktunya, data dianalisis pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis Interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu.[22]

[22]V. Wiratna, sujarweni. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers. 2014). Hlm. 244.

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan merangkum, memilih hak-hak yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau penyajian data. Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan. Hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miled dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis dan menurut Miles dan Huberman adalah penarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada temuan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

1.7.8. Keabsahan Data (Trigulasi Data)

Dalam metode yang digunakan dalam menguatkan penelitian ini, maka peneliti menggunakan trigulasi data, yaitu menggalih kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme trigulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala social. Trigulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri, dengan demikian trigulasi memungkinkan tanggapan realitas secara lebih valid.

Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights)* yang berbeda pula mengenai fenomena diteliti.

Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasaan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan trigulasi data, trigulasi ini menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan trigulasi peneliti, yaitu penelitian yang berbeda disiplin ilmunya dalam suatu penelitian dan penelitian juga termaksud dapat trigulasi sebab bersifat independen.